SEKRETARIAT DAERAH
MATRIK REVISI RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2015-2019

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

MISI :
1. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis, Cerdas, Kreatif, Inovatif dan Bermoral melalui Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Pembinaan Keagamaan.**
2. **Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya**
3. **Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan serta Mendorong Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban dalam Kehidupan Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat**

TUJUAN				SASARAN				CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS			
URAIAN		INDIKATOR		URAIAN		INDIKATOR		KEBIJAKAN		PROGRAM	
1. BAGIAN ORGANISASI SETDA.											
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	1	Persentase SKPD yang sesuai dengan PP 18 Tahun 2016	1	Peningkatan evaluasi / pemantauan pelaksanaan tupoksi pada masing-masing SKPD	1	Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan serta peningkatan Kapasitas Kelembagaan
										2	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
				2	Meningkatnya Pelayanan Publik	2	Persentase SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Publik	2	Semua SKPD harus memenuhi Standar Pelayanan Publik	3	Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat
				3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	3	Persentase LKj OPD yang berpredikat B dan CC	3	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	4	Peningkatan Kapasitas Kinerja Kelembagaan
2. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA.											
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Keagamaan	1.1	Persentase Fasilitasi pembinaan keagamaan	1.1.1	Meningkatnya fasilitasi kerukunan umat beragama	1.1.1.1	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan tertentu	1.	Memfasilitasi Umat Beragama untuk menjalankan dan memeriahkan hari besar Keagamaan	1.	Fasilitasi kegiatan sosial Keagamaan
						1.1.1.2	Persentase fasilitasi kegiatan keagamaan insidentil	2.	Meningkatkan kualitas masyarakat dalam menjalankan ibadah dan kerukunan Umat Beragama	2.	Fasilitasi Kegiatan Keagamaan
				1.1.2	Meningkatnya kesejahteraan rakyat	1.1.2.1	Jumlah bantuan kepada masyarakat kurang mampu	3.	Memberikan bantuan sembako dan melaksanakan kegiatan khitan massal dan isbat nikah	1.	Pengembangan Wawasan Kebangsaan

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
					2. Fasilitasi kegiatan kesejahteraan sosial
			1.1.2.2. Jumlah santri dan guru ngaji yang mendapatkan fasilitasi pembinaan SDM	4. Memberikan Pelatihan kepada pengurus pondok pesantren dan guru ngaji	1. Fasilitasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan
3. BAGIAN UMUM SETDA.					
1 Terwujudnya layanan kualitas di bidang kerumahtanggaan serta sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Daerah	1 Meningkatnya kualitas layanan dibidang kerumahtanggaan, sarana dan prasarana di lingkungan Setda Kabupaten Lumajang	1 Meningkatnya kualitas layanan di bidang kerumahtanggaan serta sarana prasarana perkantoran di lingkungan Setda Kab. Lumajang	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang sarana dan prasarana	1 Meningkatkan kualitas layanan di bidang sarana dan prasarana	1 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
			- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang kerumahtanggaan	1 Meningkatkan kualitas layanan di bidang kerumahtanggaan	1 Program Peningkatan Pelayanan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah 2 Program Pelayanan Kedinasan 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETDA.					
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1 Nilai LPPD Pemerintah Daerah	1 Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1 Persentase peningkatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Koordinasi OPD terkait dengan Pemerintahan Kecamatan dan Desa	1 Pengembangan wilayah perbatasan 2 Kerjasama Pembangunan 3 Pendidikan Politik Masyarakat
			2 Persentase fasilitasi pemilu Presiden/ Legislatif/ Kepala Daerah	2 Koordinasi KPU, OPD terkait dan pemerintah kecamatan	4 Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
			3 Persentase penegasan batas wilayah kecamatan	3 Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa	5 Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
			4 Persentase dokumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah	4 Koordinasi dengan OPD terkait dan Biro Pemerintahan dan Otda Prov. Jatim	6 Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 7 Perencanaan

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
		2 Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang kerjasama dan pertanahan	1 Persentase sengketa/kasus tanah pemerintah daerah yang difasilitasi 2 Persentase MoU yang ditindaklanjuti perjanjian kerjasama daerah	5 Koordinasi OPD terkait dengan Pemerintahan Kecamatan dan Desa 6 Koordinasi TKKSD dengan para pihak pelaksana perjanjian kerjasama	Pembangunan Daerah 8 Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa
5. BAGIAN HUKUM SETDA.					
1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1 Prosentase Prolegda yang ditetapkan menjadi Perda	1 Tersedianya Perangkat Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Partisipasi Masyarakat	1 Presentase Raperda yang disahkan menjadi Perda 2 Presentase produk hukum (perda dan Perbup) yang sesuai dengan kebutuhan daerah 3 Presentase Rancangan Peraturan Desa yang selaras Peraturan Perundang-undangan 4 Presentase Keterwakilan Stakeholder yang Mengikuti Uji Publik Perda	1 Pembentukan Produk Hukum daerah sesuai kebutuhan dan kewenangan daerah dengan melibatkan masyarakat	1 Program Pengembangan dan Penyempurnaan Produk Hukum
		2 Meningkatnya Pengetahuan Hukum Masyarakat	- Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum	2 Meningkatkan Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi hukum	2 Program Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat
		3 Meningkatnya penyelesaian permasalahan hukum	- Presentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang	3 Meningkatkan Presentase penyelesaian permasalahan hukum Aparatur Pemkab Lumajang	3 Program Pembinaan dan Perlindungan Hukum
6. BAGIAN ADMINISTRASI ENERGI SUMBER DAYA ALAM DAN PEREKONOMIAN SETDA.					
1 Meningkatnya usaha perdagangan	1 Prosentase kenaikan PDRB sektor perdagangan	1 Meningkatnya pengendalian stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan BBM	1 Jumlah komoditas sembako yang mengalami kenaikan/ penurunan harga maksimal 10 % 2 Persentase Realisasi penyaluran BBM terhadap kebutuhan	1 Melakukan fasilitasi koordinasi dalam rangka stabilisasi harga 2 Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pendistribusian migas	1 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri 2 Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri
2 Meningkatnya investasi di daerah	2 Prosentase kenaikan nilai PMDN	2 Meningkatnya pemanfaatan Potensi Perekonomian Daerah	- Persentase pedoman pelaksanaan bidang perekonomian dibandingkan dengan kebutuhan	3 Memberikan kemudahan investasi	3 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
		3 Meningkatnya kinerja BUMD	- Persentase BUMD yang berkategori sehat (mendapatkan laba)	4 Fasilitasi dan koordinasi pembinaan BUMD	

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
3 Meningkatnya Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial	3 Prosentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	4 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat pra sejahtera	- Prosentase penyaluran Rastra kepada Keluarga Penerima Manfaat	5 Melaksanakan upaya pengelolaan rastra secara baik	4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
7. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA.					
1 Meningkatnya pelayanan publik yang profesional	1 Prosentase pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1 Meningkatnya penyelenggaraan administrasi pembangunan yang baik dan benar 2 Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi rencana dan pelaksanaan pengadaan barang / jasa 3 Peningkatan kompetensi kematangan organisasi pengadaan barang / jasa	- Persentase OPD yang melaporkan hasil pembangunan tepat waktu - Jumlah OPD yang menyusun RUP secara benar Persentase OPD yang mengusulkan proses lelang pengadaan barang / jasa pada ULP Jumlah anggota ULP dan Pokja ULP mengikuti Diklat, Bintek, Sosialisasi dan Konsultasi	1 Melaksanakan pelaporan, monitoring, evaluasi dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dikelola OPD 2 Memfasilitasi OPD untuk upload RUP 3 Memfasilitasi OPD untuk mengajukan proses lelang 4 Persyaratan menjadi anggota Pokja ULP	1 Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa 3 Fasilitasi dan Koordinasi pelaksanaan proses barang/jasa 4 Pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/ Bintek dan sejenisnya
8. BAGIAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN SETDA.					
1 Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah		1 Meningkatkan kualitas Penatausahaan Keuangan dan Kepegawaian	1 Prosentase usulan KP yang tepat 2 Prosentase penyerapan realisasi anggaran 3 Jumlah pengesahan GU minimal 1 kali dalam sebulan 4 Prosentase penurunan jumlah temuan BPK dan APIP	1 Peningkatan pelaksanaan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan dan kepegawaian melalui peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah dan sarana prasarana	1 Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan 2 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3 Pembinaan dan Pengembangan Pegawai 4 Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
9. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA.					
1 Meningkatnya keterbukaan komunikasi dan informasi	1 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Publik	1 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Penyebarluasan Informasi Kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	1 Persentase kegiatan serta Kebijakan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah yang dimuat oleh media massa		1 Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 2 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

TUJUAN		SASARAN		CARA MENCAPAI SASARAN STRATEGIS	
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	KEBIJAKAN	PROGRAM
2 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik		2 Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	2 Persentase kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda yang di dokumentasikan 3 Persentase dialog audiensi dengan tokoh masyarakat yang diselenggarakan		
		3 Meningkatnya kualitas pelayanan keprotokolan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah	4 Persentase pelayanan keprotokolan sesuai dengan SOP Protokol		